

Pemkab Segera Sinkronkan APBD 2025



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID RABU, 19/02/2025

BAYANGKAN jika sebuah pemerintahan harus mengelola anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi, menyeimbangkan antara efisiensi belanja dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Tantangan inilah yang kini dihadapi Pemkab Kukar setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dikeluarkan. Demi memastikan langkah konkret terhadap kebijakan efisiensi ini, Bupati Kukar Edi Damansyah mengumpulkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat dalam Forum *Ngapeh Hambat*, Senin (17/2).

Rapat ini mengusung tema *Komitmen Pimpinan Terhadap Implementasi ASN BerAKHLAK dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025*, serta dipimpin Edi Damansyah, didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekkab Sunggono, serta para asisten di lingkungan Sekretariat Kabupaten.

Di hadapan para peserta, Edi menegaskan bahwa implementasi ASN BerAKHLAK merupakan sebuah konsep yang mengedepankan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, bukan sekadar seremonial atau administratif. Pemkab Kukar bahkan telah mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya tidak ingin ini hanya sekadar tanda tangan komitmen. Kita semua harus benar-benar mengawal implementasinya, karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif para pejabat pimpinan tinggi pratama," tegas Edi.

Namun, tak hanya soal penguatan mentalitas ASN, Pemkab Kukar juga dihadapkan pada tugas berat lainnya, memastikan anggaran daerah berjalan efisien tanpa menghambat pembangunan. Efisiensi anggaran 2025 kini dalam tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada Maret mendatang. Setiap program dan belanja dalam APBD akan diselaraskan dengan arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Edi menyadari bahwa penyesuaian ini bukan perkara mudah. Regulasi bisa saja mengalami perubahan, sehingga koordinasi dengan DPRD akan terus dilakukan agar kebijakan tetap berjalan efektif. Meski demikian, ia optimistis Kukar mampu melewati tantangan ini dengan baik.

"*Inshaallah*, efisiensi ini akan berjalan tanpa mengganggu program dan belanja yang telah direncanakan untuk masyarakat. Yang kita butuhkan saat ini adalah komitmen bersama untuk memastikan kebijakan ini benar-benar berdampak," tutupnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Kukar tak hanya memastikan tata kelola keuangan yang lebih cermat, tetapi juga membangun ASN yang lebih profesional dan berintegritas. Sebuah ikhtiar besar yang akan menentukan wajah pemerintahan Kukar di tahun-tahun mendatang. **(qi/kri)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Pemkab Segera Sinkronkan APBD 2025, 19/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

